



PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KOTA PARIAMAN TAHUN 2024



2024

BAGIAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025





KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, dengan segala rahmat dan karunia-NYA, Pemerintah Kota Pariaman dapat menyusun dan menyelesaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024 ini adalah untuk memenuhi maksud pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Kota Pariaman sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini berisikan uraian capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan wajib pelayanan dasar, hasil EPPD dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah serta inovasi daerah.

Kesuksesan yang telah tercapai selama rentang waktu tersebut tidak terlepas dari motivasi dan kerja keras dari semua *stakeholder* baik legislatif, eksekutif maupun masyarakat yang terlibat langsung dan berpartisipasi aktif di segala lini demi terselenggaranya tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.



Diharapkan laporan ini bermanfaat bagi perbaikan kinerja pemerintahan pada tahun berikutnya serta dapat menjadi bahan Pemerintah Pusat dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada daerah umumnya dan Kota Pariaman khususnya serta dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk melakukan perbaikan menuju arah yang lebih baik sesuai dengan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Akhirnya, kami menyadari bahwa Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami membuka diri untuk menerima masukan dan saran atas isi laporan ini, dan akan menjadi bahan untuk kesempurnaan pembuatan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun berikutnya, terima kasih.

Pariaman, 26 Maret 2024

Wali Kota Pariaman,



Yola Balad



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi | iii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Dasar Hukum..... | 1 |
| B. Gambaran Umum Daerah | 1 |
| C. Kondisi Geografis | 1 |
| D. Gambaran Umum Demografis | 4 |
| E. Indikator Kinerja Makro | 5 |
| BAB II RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR | 7 |
| A. Pendidikan | 8 |
| B. Kesehatan | 27 |
| C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 47 |
| D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman..... | 51 |
| E. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | 54 |
| F. Sosial | 56 |
| BAB III HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH | 59 |
| A. Hasil EPPD | 59 |
| B. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 59 |
| BAB IV REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH . | 61 |
| A. Penerimaan Daerah | 62 |
| B. Pengeluaran Daerah | 64 |
| BAB V INOVASI DAERAH | 66 |
| BAB VI PENUTUP | 83 |



BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DAERAH

Kota Pariaman dulunya merupakan Kota Administratif, dan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Oktober 1987.

Dengan keluarnya Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat, maka status Kota Administratif Pariaman berubah menjadi Kota Pariaman yang secara kelembagaan telah berdiri sejajar dengan daerah kota lainnya di Indonesia.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kota Pariaman adalah satu dari 19 kab/kota di Sumatera Barat, daerah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman merupakan hamparan dataran rendah dengan luas 64,97 Km², berhawa panas dan memiliki panjang garis pantai 12,7 Km. Disamping daratan terdapat 4 (empat) pulau kecil non urban yakni Pulau Angso Duo, Pulau Kasiak, Pulau Tengah, dan Pulau Ujuang.

Kota Pariaman terletak antara 00^o 33' 00" - 00^o 40' 43" Lintang Selatan dan 100^o 04' 46" - 100^o 10' 55" Bujur Timur. Kota Pariaman terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, yakni Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur.

Kota Pariaman juga identik dengan Kota Pantai dimana seluruh Kecamatan di Kota Pariaman memiliki wilayah yang berbatasan dengan pantai kecuali Kecamatan Pariaman Timur. Rata-rata ketinggian wilayahnya berada pada kisaran 0-15 meter dari permukaan laut.

Disamping memiliki pantai yang indah, Kota Pariaman juga dilewati oleh 3 (tiga) sungai yaitu Batang Pariaman sepanjang 12 Km, Batang Manggung sepanjang 11,50 Km dan Batang Manggau sepanjang 11,80 Km.

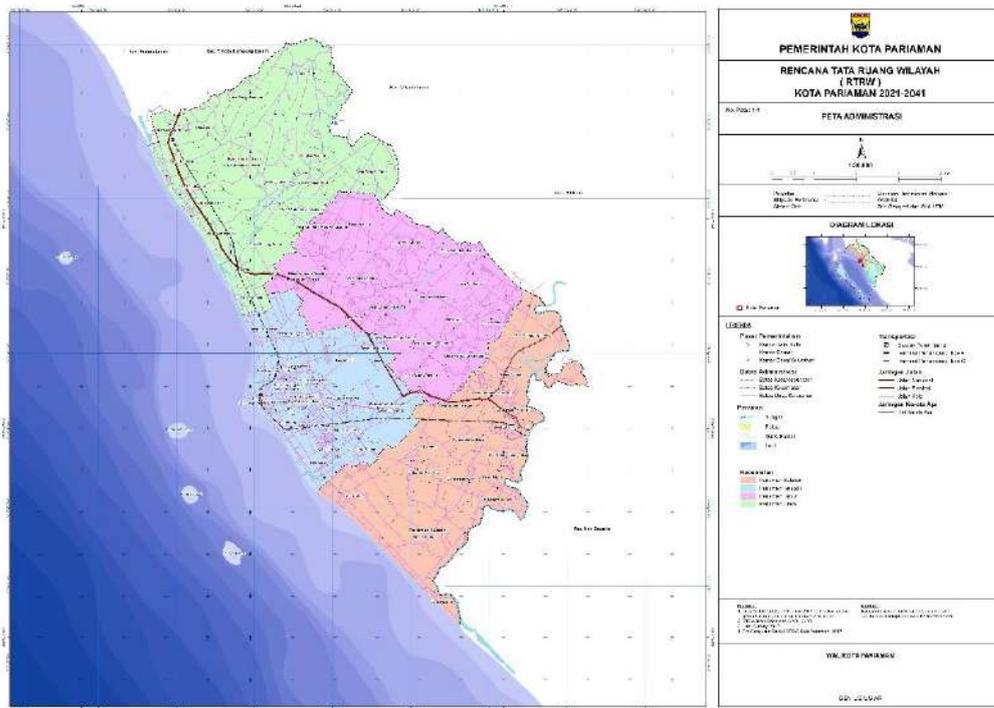
C. KONDISI GEOGRAFIS

1. Batas Administrasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomo 10 Tahun 2009, kecamatan di Kota Pariaman telah bertambah menjadi 4 (empat) kecamatan yakni : Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur.

Kota Pariaman secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan V Koto Timur (Kab. Padang Pariaman)
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Nan Sabaris (Kab. Padang Pariaman)
- c. Sebelah Timur : Kecamatan VII Koto Sungai Sarik (Kab. Padang Pariaman)
- d. Sebelah Barat : Samudra Indonesia



Peta Administrasi Kota Pariaman

2. Luas Wilayah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman sebagai salah satu Kota yang berada dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat mempunyai luas wilayah sebesar 73,36 Km² dan luas lautan 282,69 km², dengan panjang garis pantai 12,7 Km² yang mencakup 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan. Dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 10 Tahun 2009, kecamatan di Kota Pariaman telah bertambah menjadi 4 (empat) kecamatan yakni: Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022 -2042 pada tanggal 16 September 2022, Luas Wilayah Kota Pariaman yaitu 64,97 km.

3. Topografis

Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang terletak di pantai barat Propinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 meter di atas permukaan laut dengan sedikit daerah perbukitan. Memiliki 4 (empat) pulau kecil non urban yakni Pulau Angso Duo, Pulau Kasiak, Pulau Tengah, dan Pulau Ujuang dengan panjang garis pantai lebih kurang 12,7 kilometer.

Karena terletak di tepi pantai pada umumnya merupakan hamparan dataran rendah yang landai. Kondisi topografi Kota Pariaman dapat dikelompokkan kepada jenis morfologi dataran dengan ketinggian antara 2 – 35 meter di atas permukaan laut dengan sedikit daerah perbukitan. Luas kemiringan lahan dapat dirinci pada tabel berikut ini.



Tabel 1.1
Kondisi Topografi Kota Pariaman

| Kondisi Topografi | Luas (ha) | Persentase (%) |
|---------------------|-----------|----------------|
| Datar (0-3%) | 6.207 | 95,53% |
| Agak Landai (3-8%) | 23 | 0,35% |
| Landai (8-15%) | 48 | 0,74% |
| Agak Curam (15-25%) | 25 | 0,39% |
| Curam (25- 40%) | 194 | 2,99% |
| Jumlah | 6.493 | 100,0% |

Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2022-2042

4. Geologi

Seperti pada umumnya daerah lain yang berada di bagian pantai barat pulau Sumatera, Kota Pariaman memiliki jenis batuan resen dan tufa vulkan. Batuan induk penyusun adalah Aluvium serta Tuf Batu Apung dan Andesit (basal). Kota Pariaman secara geologis bersama dengan Kabupaten Padang Pariaman terletak pada dua jalur patahan lempeng dunia yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo – Australia dan topografi Padang Pariaman yang dilalui oleh banyak anak-anak sungai. Adapun jenis batuan yang terdapat di Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

1) Qal : Endapan Aluvial

Batuan Qal/endapan permukaan merupakan formasi geologi aluvium yang terdiri dari lanau, dan kerikil umumnya terdapat di daratan pantai, termasuk endapan rawa di sebelah utara tikau, sebelah Barat Daya Lubuk Alung dan sebelah Timur Padang.

2) Qpt : TUFT Batu apung dan andesit (basal).

Tuf batuapung umumnya terdiri dari serabut-serabut gelas dari 5 hingga 80% fragmen-fragmen batuapung putih (hampir tidak memiliki mineral-mineral mafik). Berukuran garis tengah 1 hingga 20 cm, agak kompak. Setempat terdapat lapisan-lapisan pasir yang kaya akan kuarsa, juga lapisan-lapisan kerikil yang terdiri dari komponen-komponen kuarsa, batuan gunung api dan batuan gamping. Setempat bongkahan-bongkahan obsidian dan pichstone berwarna kelabu kemerahan sampai kecoklatan baik yang masih segar maupun yang sudah lapuk. Endapan tuft ini mungkin berasal dari erupsi terakhir Kaldera Maninjau atau erupsi celah yang hubungannya dengan jalur sesar besar Sumatera (Westerveld, 1953). Hubungan di lapangan menunjukkan bahwa Qhpt terletak di atas Qpt.

Secara fisik butiran penyusun tanah/batuan yang terdapat di Kota Pariaman yaitu lima satuan: satuan pasir, satuan pasir lempung-lanauan, satuan pasir lempungan, satuan lempungan pasiran dan satuan lanau lempungan. Satuan butiran tanah pasir terdapat di kawasan pesisir. Satuan pasir lempungan terdapat pada dataran sementara satuan lanau lempungan terdapat pada daerah kearah timur. Satuan lempung pasiran terdapat di bagian utara di daerah Tungkal Utara dan Tungkal Selatan.



5. Klimatologi (Iklim)

Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan pertahun mencapai angka sekitar 4.055 mm dengan lama hari hujan 198 hari. Suhu rata-rata 25,34°C, dengan kelembaban udara rata-rata 85,25 dan kecepatan angin rata-rata 1,80 km/jam.

Musim kemarau dan musim hujan selalu berubah-ubah menurut waktu. Iklim yang demikian memungkinkan untuk tumbuhnya berbagai jenis tanaman, akan tetapi curah hujan dan tingkat kelembaban yang tinggi yang menimbulkan berbagai permasalahan, misalnya tanaman yang membutuhkan iklim musim kemarau tidak dapat tumbuh dengan baik, merupakan kendala bagi penanganan pasca panen komoditas tertentu yang memerlukan cuaca panas dan cerah selama proses pengeringan, kendala dalam penyimpanan komoditas, berkurangnya jumlah hari kerja produktif dan pengaruhnya negatif terhadap sejumlah komoditas. Iklim juga sangat mempengaruhi besarnya tangkapan ikan bagi nelayan.

D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Pariaman pada tahun 2024 sebanyak 101.680 jiwa, mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 dengan jumlah penduduknya sebanyak 98.690 jiwa. Dengan komposisi penduduk untuk tahun 2024 sebanyak 51.267 jiwa penduduk laki-laki dan 50.413 jiwa penduduk perempuan.

2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia

Tabel 1.2. Penduduk Kota Pariaman menurut kelompok umur dan Jenis Kelamin

| Golongan Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 0 – 4 | 4.082 | 3.767 | 7.849 |
| 5 – 9 | 4.575 | 4.127 | 8.702 |
| 10 – 14 | 4.728 | 4.465 | 9.193 |
| 15 – 19 | 4.501 | 4.110 | 8.611 |
| 20 – 24 | 4.720 | 4.465 | 9.185 |
| 25 – 29 | 4.552 | 4.153 | 8.705 |
| 30 – 34 | 3.728 | 3.427 | 7.155 |
| 35 – 39 | 3.798 | 3.577 | 7.375 |
| 40 – 44 | 3.614 | 3.367 | 6.981 |
| 45 – 49 | 3.189 | 3.020 | 6.209 |
| 50 – 54 | 2.612 | 2.747 | 5.359 |
| 55 – 59 | 2.400 | 2.551 | 4.951 |
| 60 – 64 | 1.813 | 2.104 | 3.917 |
| 65 – 69 | 1.347 | 1.753 | 3.100 |
| 70 – 74 | 823 | 1.143 | 1.966 |
| >=75 | 785 | 1.637 | 2.422 |
| Jumlah | 51.267 | 50.413 | 101.680 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024



E. INDIKATOR KINERJA MAKRO

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pariaman pada tahun 2024 sebesar 80,49 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang besarnya 79,76. Pada level Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, angka IPM Kota Pariaman menduduki urutan ke-lima.

b. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan. Jumlah penduduk miskin di Kota Pariaman tahun 2024 sebanyak 4.010 orang dengan persentase sebesar 4,26%. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2023 sebanyak 3.910 dengan persentase 4,20%.

c. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran digunakan untuk melihat tingkat pengangguran pada daerah yang bersangkutan, khususnya tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari : mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,32%, ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,68%.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman selama tahun 2024 tercatat sebesar 4,51 persen berada pada urutan ke tujuh jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya se Sumatera Barat. Angka ini diperoleh dari besarnya kenaikan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari 4.018,87 miliar rupiah pada tahun 2023 menjadi 4.200,8 miliar rupiah pada tahun 2024. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Pariaman pada tahun 2024 tercatat 6.801,89 miliar rupiah, nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun yang lalu dimana pada tahun 2023 yaitu sebesar 6.435,12 miliar rupiah.

Struktur perekonomian Kota Pariaman tahun 2024 menunjukkan 4 kategori lapangan usaha yang kontribusinya diatas 10 persen dalam pembentukan nilai tambah bruto. Secara berurutan masing-masing yaitu kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 17,38 persen, kedua kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,62 persen, dan yang ketiga kategori lapangan usaha konstruksi sebesar 15,18 persen, dan yang keempat dari sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,20 persen.

e. PDRB Per Kapita

PDRB Perkapita merupakan nilai nominal PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Artinya, nilai PDRB perkapita sangat tergantung pada besaran nilai PDRB dan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang bersangkutan. PDRB Perkapita merupakan pendekatan yang menunjukkan rata-rata pendapatan yang mungkin dinikmati oleh setiap penduduk suatu daerah selama satu tahun. Semakin tinggi PDRB Perkapita suatu daerah maka akan



menunjukkan semakin baiknya tingkat perekonomian daerah tersebut, meskipun ukuran ini tidak sepenuhnya dapat menggambarkan pendapatan antar penduduk secara riil dan merata. Penyebabnya keterbatasan PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku ini untuk mendeteksi kondisi riil perekonomian masyarakat disebabkan beberapa hal diantaranya PDRB perkapita masih belum dapat mendeteksi kesenjangan penguasaan aset dan penerimaan balas jasa faktor produksi. Selanjutnya, PDRB Perkapita masih mengandung pengaruh tingkat kenaikan harga atau inflasi sehingga belum benar-benar menggambarkan daya beli masyarakat. Namun demikian, indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro. Pada tahun 2024 Pendapatan Perkapita Kota Pariaman sebesar 69,17 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 besarnya 66,20 persen.

f. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Gini Ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh. Gini Ratio didasarkan pada kurva Lorenz yang merupakan kurva 2 dimensi antara distribusi penduduk (persentase kumulatif penduduk) dan distribusi pengeluaran perkapita (persentase kumulatif pengeluaran perkapita). Nilai Gini ratio berkisar antara 0 dan 1. Jika $G < 0,3$ berarti memiliki ketimpangan yang rendah, $0,3 < G < 0,5$ berarti memiliki ketimpangan yang sedang dan jika $G > 0,5$ berarti memiliki ketimpangan yang tinggi. Pada tahun 2024 nilai gini rasio Kota Pariaman tercatat 0,281. Ini berarti Gini Ratio Kota Pariaman masih tergolong kategori Ketimpangan Rendah.



BAB II

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program disusun dalam pencapaian rencana pembangunan yang berdasarkan kepada misi dan visi yang telah ditetapkan. Program harus dapat menggambarkan kontribusi dari pelaksanaan roda pemerintahan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan.

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Dalam capaian pelaksanaan program dan kegiatan harus menekankan pentingnya akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan target kinerja dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja merupakan keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.



A. PENDIDIKAN

Urusan Pendidikan diselenggarakan Oleh Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pariaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 152.291.856.452,34,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 150.870.465.391,00 (99,07%), dengan uraian berikut:

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Alokasi Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase realisasi (%) |
|------------|---|-------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota | | | | 116.473.967.652 | 114.086.211.212 | 97,95% |
| I | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 100 | 17.691.592 | 17.511.264 | 98,98% |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 dok | 1 dok | 100% | 4.204.112 | 4.183.784 | 99,52% |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 dok | 3 dok | 100% | 13.487.480 | 13.327.480 | 98,81% |
| II | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 114.840.760.691 | 112.665.811.171 | 98,11% |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bln | 12 Bln | 100% | 114.632.382.691 | 112.463.533.171 | 98,11% |
| 4 | Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Bln | 12 Bln | 100% | 208.378.000 | 157.900.000 | 97,07% |
| III | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 277.776.929 | 263.144.502 | 94,73% |
| 5 | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 1.998.000 | 1.998.000 | 100% |
| 6 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 13 Unit | 13 Unit | 100% | 94.100.000 | 87.563.100 | 93,05% |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 7 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 37.732.92 | 37.432.929 | 99,20% |
| 8 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 8.000.000 | 8.000.000 | 100% |
| 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bln | 12 bln | 100% | 135.946.000 | 128.150.473 | 94,27% |
| IV | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 1.151.843.440 | 970.313.739 | 84,24% |
| 10 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 97.600.000 | 73.731.739 | 75,54% |
| 11 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | 12 Bulan | 100% | 1.054.243.440 | 896.582.000 | 85,05% |
| V | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 185.895.000 | 169.430.536 | 91,14% |
| 12 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 18 unit | 18 unit | 100% | 152.120.000 | 135.785.430 | 89,26% |
| 13 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5 unit | 5 unit | 100% | 3.075.000 | 3.075.000 | 100,00% |
| 14 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 unit | 1 unit | 100% | 30.700.000 | 30.570.106 | 99,58% |
| B | Program Pengelolaan Pendidikan | | | | 30.959.597.007 | 25.674.308.868 | 82,93% |
| VI | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | 18.904.012.902 | 17.442.947.725 | 92,27% |
| 15 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 2 Sekolah | 2 Sekolah | 100% | 1.503.112.370 | 1.433.902.876 | 95,40% |
| 16 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 2 Sekolah | 2 Sekolah | 50% | 230.117.740 | 158.085.397 | 68,70% |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | |
|------------|--|------------|------------|--------|----------------------|----------------------|---------------|
| 17 | Pengadaan Mebel Sekolah | 3 paket | 3 paket | 100 | 510.400.000 | 506.510.815 | 99,24% |
| 18 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 594 siswa | 594 siswa | 100 | 640.878.782 | 604.968.790 | 94,40% |
| 19 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 1 paket | 1 paket | 100 | 303.575.165 | 297.521.150 | 98,01% |
| 20 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 228 orang | 228 orang | 100 | 2.140.607.787 | 1.760.850.000 | 82,26% |
| 21 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 1430 orang | 800 orang | 55,94% | 386.887.008 | 229.111.250 | 59,22% |
| 22 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 81 sekolah | 81sekolah | 100 | 9.917.243.000 | 9.205.375.400 | 92,82% |
| 23 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | 3 paket | 3 paket | 50 | 707.724.690 | 700.256.544 | 98,94% |
| 24 | Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah | 2 sekolah | 2 sekolah | 100% | 365.610.000 | 363.745.127 | 99,49% |
| 25 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 14 sekolah | 14 sekolah | 100% | 2.197.856.360 | 2.182.620.376 | 99,31% |
| VII | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 4.788.745.079 | 1.704.816.422 | 35,60% |
| 26 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 1 sekolah | 0 sekolah | - | 373.575.467 | - | 0,00% |
| 27 | Pembangunan Laboratorium | 1 sekolah | 0 sekolah | - | 833.530.000 | | 0,00% |
| 28 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1 sekolah | 1 sekolah | 100% | 419.400.000 | 414.983.324 | 98,95% |
| 29 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 102 siswa | 102 siswa | 100% | 166.170.348 | 155.188.348 | 93,39% |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | |
|-------------|---|-----------|-----------|--------|----------------------|----------------------|---------------|
| 30 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 2 paket | 1 paket | 50% | 143.850.000 | 30.000.000 | 20,86% |
| 31 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 84 orang | 84 orang | 100% | 803.988.943 | 769.700.000 | 95,74% |
| 32 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 150 orang | 100 orang | 66,67% | 139.676.106 | 15.036.000 | 10,76% |
| 33 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 9 sekolah | 9 sekolah | 100% | 565.357.000 | 319.908.750 | 56,59% |
| 34 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 1 sekolah | 0 sekolah | - | 1.343.197.215 | - | 0,00% |
| VIII | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | 5.808.497.026 | 5.279.940.771 | 90,90% |
| 35 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 2 paket | 2 paket | 100% | 422.059.000 | 198.818.884 | 47,11% |
| 36 | Pengadaan Mebel PAUD | 1 paket | 1 paket | 100% | 25.000.000 | 25.000.000 | 100,00% |
| 37 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | 6 sekolah | 6 sekolah | 100% | 180.000.000 | 177.988.000 | 98,88% |
| 38 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | 50 orang | 0 orang | - | 15.000.000 | - | 0,00% |
| 39 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 1 paket | 1 paket | 100% | 48.000.000 | 47.132.200 | 98,19% |
| 40 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 650 anak | 650 anak | 100% | 261.775.316 | 247.500.000 | 94,55% |
| 41 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD | 380 orang | 380 orang | 100% | 2.319.970.210 | 2.208.050.000 | 95,18% |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| 42 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 93 lembaga | 93 lembaga | 100% | 232.307.500 | 168.228.000 | 72,42% |
| 43 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 93 lembaga | 93 lembaga | 100% | 1.954.200.000 | 1.857.496.860 | 95,05% |
| 44 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | 93 lembaga | 93 lembaga | 100% | 57.714.000 | 57.714.000 | 100,00% |
| 45 | Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU | 1 sekolah | 1 sekolah | 100% | 186.471.000 | 186.197.148 | 99,85% |
| 46 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 2 sekolah | 2 sekolah | 100% | 106.000.000 | 105.815.679 | 99,83% |
| IX | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 1.458.342.000 | 1.246.603.950 | 85,48% |
| 47 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan | 93 orang | 0 orang | - | 16.700.000 | - | 0,00% |
| 48 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 30 orang | 30 orang | 100% | 69.250.000 | 43.330.000 | 62,57% |
| 49 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Non Formal/Kesetaraan | 6 lembaga | 6 lembaga | 100% | 112.500.000 | 78.950.000 | 70,18% |
| 50 | Pengelolaan Dana BOP Non Formal/Kesetaraan | 6 lembaga | 6 lembaga | 100% | 1.197.100.000 | 1.105.731.950 | 92,37% |
| 51 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Non Formal/Kesetaraan | 6 lembaga | 6 lembaga | 100% | 9.748.000 | 9.748.000 | 100,00% |
| 52 | Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan | 6 lembaga | 6 lembaga | 100% | 53.044.000 | 8.844.000 | 16,67% |
| C | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | | | | 13.009.000 | 3.906.000 | 30,03% |
| X | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 13.009.000 | 3.906.000 | 30,03% |



| | | | | | | | |
|------------|--|------------|------------|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 55 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 10 lembaga | 10 lembaga | 100% | 13.009.000 | 3.906.000 | 30,03% |
| D | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | | | | 221.803.950 | 198.071.250 | 89,30% |
| XI | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Labupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | | 85.000.000 | 74.750.000 | 87,94% |
| 56 | Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/ Kota | 20 orang | 20 orang | 100% | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,00% |
| 57 | Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 75.000.000 | 64.750.000 | 86,33% |
| XII | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten Kota | | | | 136.803.950 | 123.321.250 | 90,14% |
| 58 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota | 250 orang | 250 orang | 100% | 136.803.950 | 123.321.250 | 90,14% |
| E | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | | | | 1.603.938.250 | 1.570.277.250 | 97,90% |
| XIV | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 112.000.000 | 112.000.000 | 100,00% |
| 59 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | 1 dok | 1 dok | 100% | 112.000.000 | 112.000.000 | 100,00% |
| XVI | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan | | | | 1.025.000.000 | 1.025.000.000 | 100,00% |
| 60 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 1 dok | 1 dok | 100% | 1.025.000.000 | 1.025.000.000 | 100,00% |



| | | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|------|----------------------|----------------------|----------------|
| XVII | Pembinaan dan Pengembangan Olah raga Kreasi | | | | 466.938.250 | 433.277.250 | 92,79% |
| 61 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Permasalahan Festival dan OlahragaRekreasi | 1 dok | 1 dok | 100% | 466.938.250 | 433.277.250 | 92,79% |
| F | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan | | | | 200.000.000 | 200.000.000 | 100,00% |
| XVIII | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | 200.000.000 | 200.000.000 | 100,00% |
| 62 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 200.000.000 | 200.000.000 | 100,00% |
| | TOTAL SKB DAN SMP | | | | 4.845.282.793 | 4.568.595.467 | 94,29% |
| | SKB | | | | 261.906.546 | 256.132.935 | 97,80% |
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota | | | | 71.406.546 | 67.132.935 | 94,02% |
| I | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 7.260.000 | 6.050.000 | 83,33% |
| 1 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 7.260.000 | 6.050.000 | 83,33% |
| II | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 26.255.700 | 24.896.950 | 94,82% |
| 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 4.760.700 | 3.801.950 | 79,86% |
| 3 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 2.995.000 | 2.670.000 | 89,15% |
| 4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 18.500.000 | 18.425.000 | 99,59% |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | |
|-----------|--|----------|----------|------|--------------------|--------------------|----------------|
| IV | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 33.630.846 | 32.615.985 | 96,98% |
| 5 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 8.000.000 | 7.492.985 | 93,66% |
| 6 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 25.630.846 | 25.123.000 | 98,02% |
| V | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 4.260.000 | 3.570.000 | 83,80% |
| 7 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 4.260.000 | 3.570.000 | 83,80% |
| B | Program Pengelolaan Pendidikan | | | | 190.500.000 | 189.000.000 | 99,21% |
| VI | Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | | | | 190.500.000 | 189.000.000 | 99,21% |
| 8 | Penyediaan Pendidik dan tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 190.500.000 | 189.000.000 | 99,21% |
| | SMP Negeri 1 Pariaman | | | | 573.170.000 | 541.667.500 | 94,50% |
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota | | | | 28.970.000 | 22.467.500 | 77,55% |
| I | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 8.050.000 | 8.050.000 | 100,00% |
| 1 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 8.050.000 | 8.050.000 | 100,00% |
| II | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 17.420.000 | 10.917.500 | 62,67% |
| 2 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 1.820.000 | 1.820.000 | 100,00% |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|------|--------------------|--------------------|----------------|
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 4.050.000 | 2.870.000 | 70,86% |
| 4 | Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00% |
| 5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 10.050.000 | 4.727.500 | 47,04% |
| III | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 3.500.000 | 3.500.000 | 100,00% |
| 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 3.500.000 | 3.500.000 | 100,00% |
| B | Program Pengelolaan Pendidikan | | | | 544.200.000 | 519.200.000 | 95,41% |
| III | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 544.200.000 | 519.200.000 | 95,41% |
| 7 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 1 sekolah | 1 sekolah | 100% | 544.200.000 | 519.200.000 | 95,41% |
| | SMP Negeri 2 Pariaman | | | | 701.532.000 | 667.053.500 | 95,09% |
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota | | | | 31.932.000 | 22.473.000 | 70,38% |
| I | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 8.050.000 | 8.050.000 | 100,00% |
| 1 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 8.050.000 | 8.050.000 | 100,00% |
| II | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 23.882.000 | 14.423.000 | 60,39% |
| 2 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 1.460.000 | 1.460.000 | 100,00% |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|------|--------------------|--------------------|----------------|
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 9.962.000 | 9.028.000 | 90,62% |
| 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 2.460.000 | 2.460.000 | 100,00% |
| 5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 10.000.000 | 1.475.000 | 14,75% |
| B | Program Pengelolaan Pendidikan | | | | 669.600.000 | 644.580.500 | 96,26% |
| III | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 669.600.000 | 644.580.500 | 96,26% |
| 6 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 1 sekolah | 1 sekolah | 100% | 669.600.000 | 644.580.500 | 96,26% |
| | SMP Negeri 3 Pariaman | | | | 791.265.000 | 751.330.000 | 94,95% |
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota | | | | 28.065.000 | 23.130.000 | 82,42% |
| I | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 8.050.000 | 8.050.000 | 100,00% |
| 1 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 8.050.000 | 8.050.000 | 100,00% |
| II | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 20.015.000 | 15.080.000 | 75,34% |
| 2 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 1.950.000 | 1.500.000 | 76,92% |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 4.990.000 | 4.800.000 | 96,19% |
| 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 2.500.000 | 1.980.000 | 79,20% |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|------|--------------------|--------------------|---------------|
| 5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 10.575.000 | 6.800.000 | 64,30% |
| B | Program Pengelolaan Pendidikan | | | | 763.200.000 | 728.200.000 | 95,41% |
| III | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 763.200.000 | 728.200.000 | 95,41% |
| 6 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 1 sekolah | 1 sekolah | 100% | 763.200.000 | 728.200.000 | 95,41% |
| | SMP Negeri 4 Pariaman | | | | 511.188.500 | 455.431.100 | 89,09% |
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota | | | | 30.888.500 | 14.302.000 | 46,30% |
| I | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 15.390.000 | 8.041.000 | 52,25% |
| 1 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 15.390.000 | 8.041.000 | 52,25% |
| II | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 11.998.500 | 6.261.000 | 52,18% |
| 2 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 1.745.000 | 1.745.000 | 100,00% |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 5.133.500 | 4.516.000 | 87,97% |
| 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 bulan | - | - | 2.000.000 | - | 0,00% |
| 5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | - | - | 3.120.000 | - | 0,00% |
| III | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 3.500.000 | - | 0,00% |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|------|--------------------|--------------------|----------------|
| 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 bulan | - | - | 3.500.000 | - | 0,00% |
| B | Program Pengelolaan Pendidikan | | | | 480.300.000 | 441.129.100 | 91,84% |
| III | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 480.300.000 | 441.129.100 | 91,84% |
| 7 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 1 sekolah | 1 sekolah | 100% | 480.300.000 | 441.129.100 | 91,84% |
| | SMP Negeri 5 Pariaman | | | | 347.042.245 | 341.747.080 | 98,47% |
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota | | | | 21.442.245 | 16.147.080 | 75,30% |
| I | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 7.050.000 | 7.050.000 | 100,00% |
| 1 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 7.050.000 | 7.050.000 | 100,00% |
| II | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 14.392.245 | 9.097.080 | 63,21% |
| 2 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 1.449.995 | 1.445.000 | 99,66% |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 5.242.250 | 4.927.080 | 93,99% |
| 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 1.250.000 | 1.250.000 | 100,00% |
| 5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 6.450.000 | 1.475.000 | 22,87% |
| B | Program Pengelolaan Pendidikan | | | | 325.600.000 | 325.600.000 | 100,00% |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|------|--------------------|--------------------|----------------|
| V | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 325.600.000 | 325.600.000 | 100,00% |
| 6 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 6 Pariaman | 1 sekolah | 1 sekolah | 100% | 325.600.000 | 325.600.000 | 100,00% |
| | | | | | 393.076.324 | 360.680.324 | 91,76% |
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota | | | | 22.676.324 | 20.461.324 | 90,23% |
| I | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 12.748.160 | 10.633.160 | 83,41% |
| 1 | PenyediaanAdministrasiPelaksanaanTugas ASN | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12.748.160 | 10.633.160 | 83,41% |
| II | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 6.933.498 | 6.833.498 | 98,56% |
| 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 2.858.498 | 2.858.498 | 100,00% |
| 3 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 2.500.000 | 2.500.000 | 100,00% |
| 4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 1.575.000 | 1.475.000 | 93,65% |
| III | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 2.994.666 | 2.994.666 | 100,00% |
| 5 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 2.994.666 | 2.994.666 | 100,00% |
| B | Program Pengelolaan Pendidikan | | | | 370.400.000 | 340.219.000 | 91,85% |
| IV | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 370.400.000 | 340.219.000 | 91,85% |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|------|--------------------|--------------------|----------------|
| 6 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 7 Pariaman | 1 sekolah | 1 sekolah | 100% | 370.400.000 | 340.219.000 | 91,85% |
| | | | | | 578.535.500 | 549.168.400 | 94,92% |
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota | | | | 45.335.500 | 40.968.400 | 90,37% |
| I | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 8.047.500 | 7.050.000 | 87,60% |
| 1 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 8.047.500 | 7.050.000 | 87,60% |
| II | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 17.729.758 | 15.754.658 | 88,86% |
| 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 6.431.758 | 6.431.658 | 100,00% |
| 3 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 5.898.000 | 5.898.000 | 100,00% |
| 4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 5.400.000 | 3.425.000 | 63,43% |
| III | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 24.000.000 | 21.135.250 | 88,06% |
| 5 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 24.000.000 | 21.135.250 | 88,06% |
| IV | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | | | | 2.920.000 | 2.920.000 | 100,00% |
| 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 2.920.000 | 2.920.000 | 100,00% |
| B | Program Pengelolaan Pendidikan | | | | 253.900.000 | 244.281.300 | 96,21% |



| | | | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|------|--------------------|--------------------|----------------|
| V | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 253.900.000 | 244.281.300 | 96,21% |
| 7 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 9 Pariaman | 1 sekolah | 1 sekolah | 100% | 253.900.000 | 244.281.300 | 96,21% |
| | | | | | 380.969.420 | 354.243.420 | 92,98% |
| I | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 8.047.500 | 7.050.000 | 87,60% |
| 1 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 8.047.500 | 7.050.000 | 87,60% |
| II | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 17.729.758 | 15.754.658 | 88,86% |
| 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 6.431.758 | 6.431.658 | 100,00% |
| 3 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 5.898.000 | 5.898.000 | 100,00% |
| 4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 5.400.000 | 3.425.000 | 63,43% |
| III | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 24.000.000 | 21.135.250 | 88,06% |
| 5 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 24.000.000 | 21.135.250 | 88,06% |
| IV | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | | | | 2.920.000 | 2.920.000 | 100,00% |
| 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 2.920.000 | 2.920.000 | 100,00% |
| B | Program Pengelolaan Pendidikan | | | | 253.900.000 | 244.281.300 | 96,21% |



| | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|------|--------------------|--------------------|----------------|
| V | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 253.900.000 | 244.281.300 | 96,21% |
| 7 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 9 Pariaman | 1 sekolah | 1 sekolah | 100% | 253.900.000 | 244.281.300 | 96,21% |
| | | | | | 380.969.420 | 354.243.420 | 92,98% |
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota | | | | 29.269.420 | 27.543.420 | 94,10% |
| I | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 7.050.000 | 7.050.000 | 100,00% |
| 1 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 7.050.000 | 7.050.000 | 100,00% |
| II | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 12.193.220 | 10.467.220 | 85,84% |
| 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 8.593.220 | 8.567.220 | 99,70% |
| 3 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 3.000.000 | 1.500.000 | 50,00% |
| 4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 600.000 | 400.000 | 66,67% |
| IV | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 5.026.200 | 5.026.200 | 100,00% |
| 5 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 5.026.200 | 5.026.200 | 100,00% |
| V | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | | | | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00% |
| 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00% |



| | | | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|------|--------------------|--------------------|----------------|
| B | Program Pengelolaan Pendidikan | | | | 351.700.000 | 326.700.000 | 92,89% |
| VI | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 351.700.000 | 326.700.000 | 92,89% |
| 7 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 1 sekolah | 1 sekolah | 100% | 351.700.000 | 326.700.000 | 92,89% |
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota | | | | 45.335.500 | 40.968.400 | 90,37% |
| I | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 8.050.000 | 8.050.000 | 100,00% |
| 1 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 8.050.000 | 8.050.000 | 100,00% |
| 3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 unit | 1 unit | 100% | 4.000.000 | 4.000.000 | 100,00% |
| 4 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1 unit | 1 unit | 100% | 3.000.000 | 200.000 | 6,67% |
| 5 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 5.245.500 | 5.245.500 | 100,00% |
| 6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 2.500.000 | 2.500.000 | 100,00% |
| 7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 6.600.000 | 5.702.500 | 86,40% |
| III | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 13.000.000 | 12.330.400 | 94,85% |
| 8 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 13.000.000 | 12.330.400 | 94,85% |
| IV | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00% |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|------|--------------------|--------------------|---------------|
| 9 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00% |
| B | Program Pengelolaan Pendidikan | | | | 533.200.000 | 508.200.000 | 95,31% |
| V | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 533.200.000 | 508.200.000 | 95,31% |
| 10 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 1 sekolah | 1 sekolah | 100% | 533.200.000 | 508.200.000 | 95,31% |
| | SMP Negeri 8 Pariaman | | | | 306.597.258 | 291.141.208 | 94,96% |
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota | | | | 52.697.258 | 46.859.908 | 88,92% |
| I | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 8.047.500 | 7.050.000 | 87,60% |
| 1 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 8.047.500 | 7.050.000 | 87,60% |
| II | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 17.729.758 | 15.754.658 | 88,86% |
| 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 6.431.758 | 6.431.658 | 100,00% |
| 3 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 5.898.000 | 5.898.000 | 100,00% |
| 4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 5.400.000 | 3.425.000 | 63,43% |
| III | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 24.000.000 | 21.135.250 | 88,06% |
| 5 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 24.000.000 | 21.135.250 | 88,06% |



| | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|------|--------------------|--------------------|----------------|
| IV | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | | | | 2.920.000 | 2.920.000 | 100,00% |
| 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 2.920.000 | 2.920.000 | 100,00% |
| B | Program Pengelolaan Pendidikan | | | | 253.900.000 | 244.281.300 | 96,21% |
| V | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 253.900.000 | 244.281.300 | 96,21% |
| 7 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 9 Pariaman | 1 sekolah | 1 sekolah | 100% | 253.900.000 | 244.281.300 | 96,21% |
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota | | | | 380.969.420 | 354.243.420 | 92,98% |
| I | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 7.050.000 | 7.050.000 | 100,00% |
| 1 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 7.050.000 | 7.050.000 | 100,00% |
| II | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 12.193.220 | 10.467.220 | 85,84% |
| 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 8.593.220 | 8.567.220 | 99,70% |
| 3 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 3.000.000 | 1.500.000 | 50,00% |
| 4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 600.000 | 400.000 | 66,67% |
| IV | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 5.026.200 | 5.026.200 | 100,00% |



| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|------|--------------------|--------------------|----------------|
| 5 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 5.026.200 | 5.026.200 | 100,00% |
| V | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | | | | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00% |
| 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00% |
| B | Program Pengelolaan Pendidikan | | | | 351.700.000 | 326.700.000 | 92,89% |
| VI | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 351.700.000 | 326.700.000 | 92,89% |
| 7 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 1 sekolah | 1 sekolah | 100% | 351.700.000 | 326.700.000 | 92,89% |

B. KESEHATAN

Urusan Kesehatan diselenggarakan Oleh Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 137.847.308.627,28 dan realisasi anggaran sebesar Rp 130.503.276.786,00 (94,67%), dengan uraian berikut :

| Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Kebijakan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Alokasi Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase Realisasi (%) |
|---|---|--|--------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | | | 98.305.956.740 | 93.788.144.536 | 95,40 |
| Bidang Kesehatan | | | | | | 98.305.956.740 | 93.788.144.536 | 95,40 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota | | Persentase terlayannya administrasi perkantoran | | | | 64.099.906.907 | 62.945.460.961 | 98,20 |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|------------|------|----------------|----------------|--------|
| Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 8.993.250 | 6.425.000 | 71,44 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 63.085.191.993 | 62.032.734.684 | 98,33 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 63.085.191.993 | 62.032.734.684 | 98,33 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN Mendapatkan Gaji Dan Tunjangan | DPA 2024 | 620 Orang | 620 Orang | 100% | 62.945.763.993 | 61.893.306.684 | 98,33 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen penyedia Administrasi pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan | DPA 2024 | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | 139.428.000 | 139.428.000 | 100,00 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 170.320.816 | 168.665.955 | 99,03 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor | Jumlah paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | DPA 2024 | 2 Paket | 2 Paket | 100% | 5.005.000 | 5.005.000 | 100,00 |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|------------|------|-------------|-------------|--------|
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket Peralatan kantor yang disediakan | DPA 2024 | 4 Paket | 4 Paket | 100% | 69.849.000 | 68.500.000 | 98,07 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik yang disediakan | DPA 2024 | 2 Paket | 2 Paket | 100% | 22.563.816 | 22.563.816 | 100,00 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | DPA 2024 | 2 Paket | 2 Paket | 100% | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,00 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kooardinasi dan konsultasi SKPD | DPA 2024 | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 62.903.000 | 62.597.139 | 99,51 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 418.246.848 | 357.334.872 | 85,44 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat | DPA 2024 | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | DPA 2024 | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 154.200.000 | 94.126.320 | 61,04 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | DPA 2024 | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 264.046.848 | 263.208.552 | 99,68 |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | | |
|---|--|----------|---------|---------|------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan | | | | | | 417.154.000 | 380.300.450 | 91,17 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | DPA 2024 | 25 Unit | 25 Unit | 100% | 217.154.000 | 180.400.450 | 83,07 |
| Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan | DPA 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan | DPA 2024 | 1 unit | 1 unit | 100% | 200.000.000 | 199.900.000 | 99,95 |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | DPA 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Pesentase Meningkatnya Upaya UKP dan UKM | | | | | 33.113.758.583 | 30.059.840.587 | 90,78 |
| Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota | Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota | | | | | 19.170.829.976 | 18.850.961.636 | 98,33 |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | | |
|--|---|--|----------|----------|------|----------------|----------------|-------|
| Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun | Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 25 tahun 2023 tentang Laboratorium Kesehatan Masyarakat | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 15.653.800.594 | 15.374.137.399 | 98,21 |
| Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan sarana prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar | UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Kepmenkes 2015 tahun 2023 tentang Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 1.706.617.482 | 1.703.234.482 | 99,80 |
| Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat penunjang medic fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pemeliharaan rutin dan berkala Alkes/Alat Penunjang Medik Fasilitas pelayanan kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat penunjang medic fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar | Permenkes RI No. 54 Tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan | 126 Item | 126 Item | 100% | 49.470.000 | 49.228.500 | 99,51 |
| Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan | Perpres RI No.12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah | 187 Item | 178 Item | 100% | 1.760.941.900 | 1.724.361.255 | 97,92 |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---|---|----------------|----------------|-------|
| | Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | | | | | | | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota | | | | | | 13.925.327.807 | 11.208.878.951 | 80,49 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | 726 Orang | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | 726 Orang | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | 608 Orang | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah bayi balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | 640 Orang | 0 | 0 | - | 0 | 0 |



| | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|---|---|-------------|-------------|-------|
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | 5200 Orang | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | 22.892 Orang | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | Jumlah Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | 4.400 Orang | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | 6.270 Orang | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | 600 Orang | | | 153.500.000 | 153.438.500 | 99,96 |



| | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------|-------------|------|------------|------------|-------|
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang gangguan Jiwa Berat | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar | | 80 Orang | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis | Jumlah orang terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | <ul style="list-style-type: none"> • Permenkes 67 Tahun 2016 • Perpres 67 Tahun 2021 | 905 Orang | 905 Orang | 100% | 9.173.000 | 7.178.500 | 78,26 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan resikoTerinfeksi HIV | Jumlah orang yang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | <ul style="list-style-type: none"> • MDGs •Kepmenkes Nomor 23 tahun 2022 ttg Penanggulangan AIDS dan PIMS | 1.188 Orang | 1.188 Orang | 100% | 28.800.000 | 28.480.000 | 98,89 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 16.770.000 | 11.750.000 | 70,07 |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|-----------|------|-------------|-------------|--------|
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 56.374.000 | 56.374.000 | 100,00 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | 5 Dokumen | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023 Tentang Penyehatan Lingkungan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 232.855.000 | 232.855.000 | 100,00 |
| Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang germas | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100% | 321.310.000 | 320.078.665 | 99,62 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisiona, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya | Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Tradisiona, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya | | 1 Dokumen | 0 | 0 | - | 0 | 0 |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|------------|------|----------------|---------------|--------|
| Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 121.116.000 | 121.116.000 | 100,00 |
| Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan khusus | | 3 Dokumen | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil pelayanan kesehatan penyakit Menular dan Tidak Menular | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 543.884.716 | 494.536.890 | 90,93 |
| Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Perpres RI No.64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | 12.144.777.316 | 9.544.594.896 | 78,59 |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | Kesehatan | | | | | | |
|---|--|---|--------------|-------------|------|------------|------------|--------|
| Pengambilan dan pengiriman specimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Jumlah specimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan | | 150 Spesimen | 15 Spesimen | 10% | 55.250.000 | 4.176.500 | 7,56 |
| Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat | Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat | Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-185 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 42.337.000 | 42.332.000 | 99,99 |
| Operasional pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit | | 1 Dokumen | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Operasional pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen operasional pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya | Jumlah Dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 13.005.000 | 13.005.000 | 100,00 |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------|---------|------|------------|------------|--------|
| Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi | | 1 Fasilitas | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal) | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan | 1 Laporan | 0 | 0 | 7.200.000 | 0 | 0 |
| Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public safety center (119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan RS dalam satu system penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Permenkes Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 22.648.000 | 22.648.000 | 100,00 |
| Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan Respon Wabah | Jumlah dokumen hasil Kewaspadaan dini dan Respon Wabah | | 1 Dokumen | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | Permenkes No.22 Tahun 2022 | 1 Orang | 1 Orang | 100% | 84.397.775 | 84.385.000 | 99,98 |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|-----------|-----------|------|------------|------------|--------|
| Pengelolaan upaya pelayanan kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 39.880.000 | 39.880.000 | 100,00 |
| Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Integrasi | Jumlah Dokumen Informasi Kesehatan secara Integrasi | | | | | 17.600.800 | 0 | 0,00 |
| Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan system Informasi Kesehatan | | 1 Dokumen | | | 17.600.800 | 0 | 0,00 |
| Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Rekomendasi Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan RS | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi, dan ditindaklanjuti perizinannya | | 1 Rumah | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional | | 56 Unit | 0 | 0 | - | 0 | 0 |



| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---|---|--------------------|--------------------|--------------|
| | Mutu (INM) pelayanan kesehatan | | | | | | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar | | | | | 605.330.250 | 355.007.258 | 58,65 |
| Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan | | 56 Unit | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar | | | | | 605.330.250 | 355.007.258 | 58,65 |
| Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kab/kota | Jumlah Rekomendasi izin praktek tenaga kesehatan yang dikeluarkan | | | | | 8.306.250 | 4.073.250 | 49,04 |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|-----------|------|------------|------------|-------|
| Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan | UU no.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Permenkes RI Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 8.306.250 | 4.073.250 | 49,04 |
| Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan | | | | | 64.310.000 | 62.150.000 | 96,64 |
| Perencanaan dan Distribusi serta pemerataan SDM kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta pemerataan SDM kesehatan | <ul style="list-style-type: none">• Peraturan BAKN Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Kepegawaian Jabatan Fungsional Kesehatan.• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 64.310.000 | 62.150.000 | 96,64 |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|------|--------------------|--------------------|--------------|
| Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan Sesuai standar | Jumlah Dokumen Hasil Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan Sesuai standar | | 1 Dokumen | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pembinaan dan pengawasan Sumber daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan pengawasan Sumber daya Manusia Kesehatan | | 1 Dokumen | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pengembangan Mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kab/ Kota | | | | | | 532.714.000 | 288.784.008 | 54,21 |
| Pengembangan Mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kab/ Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat daerah Kabupaten/ kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya | Permendagri No.13 Tahun 2024 Tentang Posyandu • Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan | 620 Orang | 620 Orang | 100% | 532.714.000 | 288.784.008 | 54,21 |
| Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makan Dan Minuman | Meningkatnya Mutu pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | | 372.901.000 | 313.775.730 | 84,14 |



| Pemberian izin apotek, Toko obat, toko alat kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah rekomendasi izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|-----------|------|-------------|------------|-------|
| Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan, perizinan Apotek, Toko Obat, Toko alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan, perizinan Apotek, Toko Obat, Toko alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | 1 Dokumen | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Penerbitan sertifikat produksi pangan IRT dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah tangga | Jumlah sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yang dikeluarkan | | | | | 111.818.750 | 74.518.750 | 66,64 |
| Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan IRT dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan | Per BPOM No.11 tahun 2024 tentang Petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 111.818.750 | 74.518.750 | 66,64 |



| | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|---|---|---|---|---|--|
| makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah tangga | sertifikat produksi pangan IRT dan dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah tangga | non fisik bidang kesehatan menu kegiatan bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan tahun anggaran 2024 | | | | | | | |
| Penerbitan sertifikat laik higienesantasi TPM dan DAM | Jumlah Rekomendasi sertifikat laik hygiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat lai higienes anitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antaera lain Jasa Boga, Rumah Makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan, perizinan Apotek, Toko Obat, Toko alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | 7 Dokumen | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|-----------|------|--------------------|--------------------|---------------|
| Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makann minuman industri Rumah Tangga | | | | | | 261.082.250 | 239.256.980 | 91,64 |
| Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan | Jumlah Produk Dan Sarana Produksi Makan dan minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang dilakukan pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | Per BPOM No.11 tahun 2024 tentang Petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan menu kegiatan bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan tahun anggaran 2024 | 75 Produk | 75 Produk | 100% | 261.082.250 | 239.256.980 | 91,64 |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Meningkatnya Mutu pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | | 114.060.000 | 114.060.000 | 100,00 |
| Perencanaan Kebutuhan dan Pendencygunaan Sumberdaya Manuasia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota | | | | | | Rp 145,525,400 | Rp 127,742,400 | 88% |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|-----------|------|------------|------------|--------|
| Peningkatan Upaya Promkes, Advokasi, Kemitraan, dan pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan pemberdayaan Masyarakat | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 34.800.000 | 34.800.000 | 100,00 |
| Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif Tingkat Daerah Kab/Kota | Persentase Rumah Tangga PHBS | | | | | | | |
| Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | 4 Dokumen | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah UKBM yang dibina | | | | | 79.260.000 | 79.260.000 | 100,00 |
| Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Permendagri No.13 Tahun 2024 Tentang Posyandu | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 79.260.000 | 79.260.000 | 100,00 |



C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 36.987.810.021,30 dan realisasi anggaran sebesar Rp 34.800.356.384,00 (94,09%), dengan uraian berikut :

| No | Program/kegiatan | Kebijakan | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian kinerja (%) | Alokasi anggaran (Rp) | Realisasi anggaran (Rp) | Persentase realisasi (%) |
|-----------|--|---------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | | 72,50 % | | 100,00% | 797.657.150 | 778.777.580 | 97,63% |
| 1 | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota | UU No 17 Tahun 2019 | 25,89 % | 25,30 % | 100,00% | 291.465.650 | 285.257.850 | 97,87% |
| 2 | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota) | UU No 17 Tahun 2019 | 72,50 % | 82,26 % | 100,00% | 506.191.500 | 493.519.730 | 97,50% |
| II | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | | 42,50% | 42,50% | 100,00% | 1.716.635.200 | 1.694.157.590 | 98,69% |
| 1 | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten/Kota | UU No 17 Tahun 2019 | 42,50% | 42,50% | 100,00% | 1.716.635.200 | 1.694.157.590 | 98,69% |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| No | Program/kegiatan | Kebijakan | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian kinerja (%) | Alokasi anggaran (Rp) | Realisasi anggaran (Rp) | Persentase realisasi (%) |
|------------|---|--|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| III | Program Penyelenggaraan Jalan | | 72,16% | 63,61% | 100,00% | 14.880.398.159 | 14.688.699.475 | 98,71% |
| | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan | 72,16% | 63,61% | 100,00% | 14.880.398.159 | 14.688.699.475 | 98,71% |
| IV | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | | 0% | 0% | 0,00% | 4.900.000 | 4.900.000 | 100,00% |
| 1 | Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | UU No.2 Tahun 2012 tentang Jakon | 0% | 0% | 0,00% | 4.900.000 | 4.900.000 | 100,00% |
| V | Program Penataan Bangunan Gedung | | 80,10% | 80,10% | 100,00% | 3.098.697.686 | 2.363.210.334 | 76,26% |
| 1 | Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja | 80,10% | 80,10% | 100,00% | 3.098.697.686 | 2.363.210.334 | 76,26% |
| VI | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | | 7 Kawasan | 2 Kawasan | 100 % | 181.408.400 | 179.474.000 | 98,93% |
| 1 | Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota | UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja | 7 Kawasan | 2 Kawasan | 100 % | 181.408.400 | 179.474.000 | 98,93% |



| No | Program/kegiatan | Kebijakan | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian kinerja (%) | Alokasi anggaran (Rp) | Realisasi anggaran (Rp) | Persentase realisasi (%) |
|-------------|--|---|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | PP no.16 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung PP No.15 Tahun 2021 tentang arsitek | | | | | | |
| VII | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | 96,55 % | 96,55 % | 100,00% | 896.394.000 | 878.811.890 | 98,04% |
| 1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota | | 96,55 % | 96,55 % | 100,00% | 896.394.000 | 878.811.890 | 98,04% |
| | | | | | | | | |
| VIII | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | 71,53% | 71,53% | 100,00% | 4.018.682.633 | 3.957.414.577 | 98,48% |
| 1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air | | 71,53% | 71,53% | 100,00% | 4.018.682.633 | 3.957.414.577 | 98,48% |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| No | Program/kegiatan | Kebijakan | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian kinerja (%) | Alokasi anggaran (Rp) | Realisasi anggaran (Rp) | Persentase realisasi (%) |
|-----------|---|--|-------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | |
| IX | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | | 1 dok | 0 | 0,00% | 304.702.840 | 121.109.540 | 39,75% |
| 1 | Kegiatan Penetapan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja | 1 dok | 0 | 0,00% | 304.702.840 | 121.109.540 | 39,75% |
| | | | | | | | | |
| X | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | | 5 Berita Acara | 7 Berita Acara | 100,00% | 52.523.250 | 25.151.350 | 47,89% |
| 1 | Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota | UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 | 5 Berita Acara | 7 Berita Acara | 100,00% | 52.523.250 | 25.151.350 | 47,89% |
| | | | | | | | | |
| XI | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah | | 81,93% | 81,93% | 100,00% | 91.729.250 | 51.286.910 | 55,91% |
| 1 | Kegiatan Penerbitan Izin membuka Tanah | PP No. 18 Tahun 2021 | 81,93% | 81,93% | 100,00% | 91.729.250 | 51.286.910 | 55,91% |



D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.704.490.079,54 dan realisasi anggaran sebesar Rp 17.527.731.050,00 (93,71%), dengan uraian berikut :

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KEBIJAKAN | TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN KINERJA (%) | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | PERSENTASE REALISASI (%) |
|----|--|---|-------------------------------|-----------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | | | | | | | |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas OPD PerkimLH | 100% | 100,00 % | 100,00 | 8.252.455.929,54 | 7.945.365.576 | 96,28 |
| 1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 100% | 100,00 % | 100,00 | 30.260.000 | 30.257.000 | 99,99 |
| 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Mengatur Pembayaran Gaji Asn Dan Cpns | 100% | 100,00 % | 100,00 | 7.470.134.601,54 | 7.278.350.073 | 97,43 |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KEBIJAKAN | TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN KINERJA (%) | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | PERSENTASE REALISASI (%) |
|----|--|--|-------------------------------|-----------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Keperluan Administrasi Umum Perangkat Daerah Disperkim Lh | 100% | 100,00 % | 100,00 | 241.008.100 | 230.675.100 | 95,71 |
| 4 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan | 100% | 100,00 % | 100,00 | 301.545.228 | 233.793.024 | 77,53 |
| 5 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara | 100% | 100,00 % | 100,00 | 209.508.000 | 172.290.379 | 82,24 |
| II | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam | 100% | 0% | 0 | 97.735.000 | 82.626.600 | 84,54 |
| | | Jumlah Dokumen Pengembangan Perumahan | 1 Dok | 1 Dok | 100 | | | |
| 1 | Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Pendataan Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 1 Dok | 1 Dok | 100% | 83.745.000 | 82.626.600 | 98,66 |
| 2 | Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang di Bangun dan di Rehabilitasi | 1 Unit Rumah | 0% | 0,00 | 13.990.000 | 0 | 0,00 |



| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KEBIJAKAN | TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN KINERJA (%) | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | PERSENTASE REALISASI (%) |
|-----|---|--|-------------------------------|-----------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | JUMLAH LUASAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG TERTANGANI | 25,05 Ha | 1,79 Ha | 7,15% | 4.073.356.400 | 3.914.322.520 | 96,10 |
| | | PERSENTASE PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK HUNI (PERSENTASE PERUMAHAN LAYAK HUNI) | 92,53% | 93,16 % | 100,68% | | | |
| 1 | Kegiatan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan | 1 Kwsn | 1 Kwsn | 100% | 4.073.356.400 | 3.914.322.520 | 96,10 |
| IV | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | PERSENTASE PERUMAHAN YANG TELAH DILENGKAPI PRASARAN, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU) YANG DITINGKATKAN | 25% | 16,67 % | 66,68% | 4.353.456.750 | 4.183.191.610 | 96,09 |
| 1 | Kegiatan Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan | Tercapainya Cakupan Infrastruktur Perumahan Yang baik dan aman yang di Dukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) | 6 Lokasi | 6 Lokasi | 100% | 4.353.456.750 | 4.183.191.610 | 96,09 |



E. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.854.481.351,42 dan realisasi anggaran sebesar Rp 17.152.334.258,00 (96,07%), dengan uraian berikut :

| No | Program/Sub Kegiatan | Kebijakan | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | realisasi (%) |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DINAS SATPOL PP & DAMKAR | | | | | | | | |
| I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | | | |
| 1 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | APBD & APBD PerubahanTahun 2023 | 1 tahun | 1 tahun | 100% | Rp 5.061.385.048,- | Rp 5.041.652.200,- | 99,61% |
| 2 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | APBD & APBD PerubahanTahun 2023 | 1 tahun | 1 tahun | 100% | Rp 170.983.300,- | Rp 165.842.009,- | 96,99% |
| 3 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | APBD & APBD PerubahanTahun 2023 | 1 tahun | 1 tahun | 100% | Rp 134.643.600,- | Rp 76.959.636,- | 57,16% |
| 4 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | APBD & APBD PerubahanTahun 2023 | 1 tahun | 1 tahun | 100% | Rp 202.699.100,- | Rp 155.946.100,- | 76,93% |
| II Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | |
| 1 | Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota | APBD & APBD PerubahanTahun 2023 | 1 tahun | 1 tahun | 100% | Rp 3.409.671.260,- | Rp 3.219.219.884,- | 94,41% |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------|-----------|------|--------------------|--------------------|--------|
| 2 | Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | APBD & APBD Perubahan Tahun 2023 | 1 tahun | 1 tahun | 100% | Rp 54.345.000,- | Rp 34.370.000,- | 63,24% |
| III | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | | | | | |
| 1 | Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | APBD & APBD Perubahan Tahun 2023 | 1 tahun | 1 tahun | 100% | Rp 2.249.246.400,- | Rp 2.172.391.991,- | 96,58% |
| 2 | Investigasi Kejadian Kebakaran | APBD & APBD Perubahan Tahun 2023 | 1 tahun | 1 tahun | 100% | Rp 5.000.000,- | Rp 5.000.000,- | 100% |
| 3 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | APBD & APBD Perubahan Tahun 2023 | 100% | 100% | 100% | Rp 6.450.000,- | Rp - | 0% |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | | Rp 5.523.770.467,- | Rp 5.230.306.704,- | 94,69% |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 | 100% | 100% | 100% | Rp 3.394.095.467,- | Rp 3.242.234.340,- | 95,53% |
| a | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 | 7 laporan | 7 laporan | 100% | Rp 3.500.000,- | Rp 3.500.000,- | 100% |
| b | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 | 1 tahun | 1 tahun | 100% | Rp 2.586.654.017,- | Rp 2.537.581.044,- | 98,10% |
| c | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 | 1 tahun | 1 tahun | 100% | Rp 278.150.000,- | Rp 260.523.171,- | 93,66% |
| d | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 | 1 unit | 1 unit | 100% | Rp 15.000.000,- | Rp 14.985.000,- | 99,90% |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------|------------|------------|------|--------------------|--------------------|--------|
| | Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| e | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 | 1 tahun | 1 tahun | 100% | Rp 200.540.000,- | Rp 164.307.285,- | 81,93% |
| f | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 | 5 jenis | 5 jenis | 100% | Rp 310.251.450,- | Rp 261.337.840,- | 84,23% |
| II | Program Penanggulangan Bencana | | 100% | 100% | 100% | Rp 2.129.675.000,- | Rp 1.988.072.364,- | 93,35% |
| a | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | 50 orang | 50 orang | 100% | Rp 158.466.600,- | Rp 157.453.300,- | 99,36% |
| b | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | 930 orang | 930 orang | 100% | Rp 193.274.000,- | Rp 152.032.320,- | 78,66% |
| c | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100% | Rp 1.724.454.400,- | Rp 1.625.777.244,- | 94,28% |
| d | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | 1 dokume | 1 dokumen | 100% | Rp 53.480.000,- | Rp 52.809.500,- | 98,75% |

F. SOSIAL

Urusan Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Pariaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.886.670.225,12- dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.761.104.815,00 (96,77%), dengan uraian berikut :

| No | Program/kegiatan | Kebijakan | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian kinerja (%) | Alokasi anggaran (Rp) | Realisasi anggaran (Rp) | Persentase realisasi (%) |
|----------|--|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 1 tahun | 1 tahun | 100 | Rp. 2.733.378.743,- | Rp. 2.577.892.009,- | 94,31 |
| I | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | | | |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|----------------------------------|-----|-------------------|----------------------|-------|
| 1 | Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota | Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 80 % (PPKS) 8 (Lembaga) | 80 % (PPKS) 8 (Lembaga) | 100 | Rp. 152.158.150,- | Rp. 143.487.750,- | 94,30 |
| 2 | Pengembangan Kemampuan SDM Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) | Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 100 org/sertifika t | 100 org/sertifika t | 100 | Rpo. 42.900.000,- | Rp. 39.900.000,- | 93,00 |
| II PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | | | | |
| 1 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti | Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 100 % | 100 % | 100 | Rp. 690.553,570,- | Rp. 667.388.322,- | 96,64 |
| 2 | Rehabilitasi Sosial dasar PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial | Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 100 % | 100 % | 100 | Rp.35.545.400,- | Rp.35.462.000,- | 99,76 |
| III PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 55.000 DTKS | 55.000 DTKS | 100 | Rp. 47.695.000,- | Rp. 45.695.000,- | 95,80 |
| 2 | Fasilitasi Bansos Keluarga | Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 100 % | 100 % | 100 | Rp. 47.333.800,- | Rp. 42.421.852,- | 89,62 |
| IV PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | | | | |
| 1 | Perlindungan Sosial Korban | Perda No. 4 tahun | 100 % | 100 % | 100 | Rp. 61.623.500,- | Rp. | 82,14 |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-------|------------------|------------------|-------|
| | Bencana alam dan sosial kabupaten/kota | 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | | | | | 50.622.250,- | |
| 2 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota | Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2 kpg/2 lumbung | 2 kpg/2 lumbung | 100% | Rp. 16.720.000,- | Rp. 12.000.000,- | 71,77 |
| 3 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 25 org | 25 org | 100 % | Rp. 16.766.700,- | Rp. 16.720.000 | 99,72 |
| V | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | | | | |
| 1 | Pemeliharaan TMP Nasional Kabupaten/Kota | Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 87 makam | 87 makam | 100 | Rp. 15.866.910,- | Rp. 15.849.750,- | 99,87 |
| 2 | Pengamanan TMP | Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 87 makam | 87 makam | 100 | Rp. 23.982.520,- | Rp. 23.800.000,- | 99,23 |



BAB III

HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. HASIL EPPD

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kota Pariaman mendapatkan skor **3,2982** dengan status “Sedang”.

B. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. Opini Atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain :

- a) Pengelolaan Retribusi Grosir dan Pertokoan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tidak Sesuai Ketentuan;



- b) Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Honorarium, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat tidak sesuai ketentuan dengan jumlah sebesar Rp 1.903.941.732,76 (Rp 1.337.778.000,00 + Rp 228.573.187,70 + Rp 246.918.653,00 + Rp 90.671.892,06); dan
- c) APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 mengalami Defisit Kas sehingga menimbulkan hutang yang harus segera dibayar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Pariaman antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk:
 - a. Menetapkan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran sewa kios dari penyewa pertama dan menagih minimal sebesar Rp 771.671.496,00 serta menyetorkan ke Kas Daerah.
 - b. Mengintruksikan kepala UPTD Pasar Pariaman untuk:
 - 1) Intensif melakukan pemungutan atas sewa kios yang telah disetor penyewa kedua kepada penyewa pertama minimal Rp 276.780.713,00 (Rp 174.518.213,00+Rp 102.262.500,00) dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
 - 2) Melakukan pemutakhiran perjanjian sewa menyewa setiap tahun.
2. Kepala OPD terkait temuan pada Akun Belanja Barang dan Jasa memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp 1.473.583.130,06 (Rp 1.225.960.931,00 + Rp 156.950.307,00 + Rp 90.671.892,06) dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
3. Sekretaris Daerah supaya:
 - a. Memproyeksikan jumlah pendapatan daerah yang realistis sesuai sumber pendapatan yang senyatanya; dan
 - b. Merumuskan langkah-langkah strategis mengatasi defisit keuangan diantaranya dengan melakukan rasionalisasi anggaran untuk kegiatan yang tidak mendesak dan tidak prioritas.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.



BAB IV

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD.

Penerimaan Pemerintah Daerah adalah hasil dari suatu perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu yang menyangkut seluruh penerimaan yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya.

Penerimaan pemerintah akan memberikan pandangan yang sangat membantu tentang bagaimana kebijakan-kebijakan yang berbeda yang mampu mengontrol pertumbuhan anggaran pemerintah dan konsekuensinya menghalangi tingkat defisit keuangan daerah. Penerimaan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah, selain jumlah penduduk juga mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah.

Selain penerimaan, seperti lazimnya sebuah organisasi, pemerintah melakukan banyak pengeluaran untuk membiayai kegiatan pembangunan. Pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari akan tetapi untuk membiayai kegiatan perekonomian, seperti menggerakkan dan merancang kegiatan ekonomi yang masyarakatnya atau kalangan swasta tidak tertarik untuk menjalankannya.

Pengeluaran pemerintah daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Berdasarkan kinerja dalam struktur anggaran daerah pengeluaran daerah dibagi menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran pemerintah yang konsumtif sebab pengeluaran ini manfaatnya hanya satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah asset atau kekayaan daerah, sedangkan pengeluaran



pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif karena pengeluaran ini digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif yang dapat menambah kekayaan daerah.

A. PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Pada tahun anggaran 2024, target pendapatan Pemerintah Kota Pariaman sebesar Rp669.473.661.957,00 dengan realisasi sebesar Rp644.362.029.673,36 atau sebesar 96,25%. Realisasi Pendapatan TA 2024 meningkat sebesar Rp18.532.946.203,32 atau 2,88% dari realisasi pendapatan TA 2023 sebesar Rp625.829.083.470,04. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan TA 2024 dan 2023 adalah:

Tabel 4.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan

| Uraian | 2024 | | % | 2023 |
|--|------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran setelah Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENDAPATAN | 669.473.661.957,00 | 644.362.029.673,36 | 96,25 | 625.829.083.470,04 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 53.788.984.257,00 | 45.911.378.642,36 | 85,35 | 38.861.600.702,04 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 14.135.000.000,00 | 14.396.111.950,00 | 101,85 | 14.323.956.113,00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 12.636.235.000,00 | 9.376.715.070,00 | 74,20 | 3.115.174.963,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 11.331.512.753,00 | 11.331.512.753,00 | 100,00 | 10.042.663.440,00 |
| Lain-lain PAD yang sah | 15.686.236.504,00 | 10.807.038.869,36 | 68,90 | 11.379.806.186,04 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 615.684.677.700,00 | 598.450.651.031,00 | 97,20 | 580.803.758.528,00 |
| Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 527.380.968.000,00 | 523.642.264.998,00 | 99,29 | 505.788.526.492,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 4.780.810.000,00 | 6.320.110.669,00 | 132,20 | 6.516.066.396,00 |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 5.977.692.000,00 | 5.977.692.000,00 | 100,00 | 7.422.153.000,00 |



| Uraian | 2024 | | % | 2023 |
|---|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | Anggaran setelah Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dana Alokasi Umum | 412.646.363.000,00 | 417.506.738.000,00 | 101,18 | 400.085.686.160,00 |
| Dana Alokasi Khusus | 103.976.103.000,00 | 93.837.724.329,00 | 90,25 | 91.764.620.936,00 |
| Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 41.844.428.000,00 | 41.844.428.000,00 | 100,00 | 47.385.758.000,00 |
| Dana Insentif Daerah (DID) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.012.923.000,00 |
| Dana Desa | 41.844.428.000,00 | 41.844.428.000,00 | 100,00 | 41.372.835.000,00 |
| Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 46.459.281.700,00 | 32.963.958.033,00 | 70,95 | 27.629.474.036,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah | 46.459.281.700,00 | 32.963.958.033,00 | 70,95 | 26.989.474.036,00 |
| Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000.000,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.163.724.240,00 |
| Pendapatan Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272.000.000,00 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.891.724.240,00 |

Penerimaan pembiayaan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp7.383.487.579,00 dan realisasinya sebesar Rp7.383.487.579,51 sebesar 100,00%. Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2024 merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai berikut:

Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

| Uraian | Nilai (Rp) |
|---------------------------------|------------------|
| 1 | 2 |
| ➤ Kas Umum Daerah Kota Pariaman | 5.184.423.125,13 |
| ➤ Kas di BLUD | 1.163.925.554,00 |
| ➤ Kas di Bendahara BOS | 122.385,00 |



| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| ➤ Kas Dana Kapitasi pada FKTP | 42.669.245,38 |
| ➤ Kas Dana BOK Puskesmas | 992.347.270,00 |
| Jumlah | 7.383.487.579,51 |

B. PENGELUARAN DAERAH

Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

TA 2024 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Hibah
 - d. Belanja Bantuan Sosial
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya
3. Belanja Tak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Transfer Bagi hasil Pendapatan
 - b. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Pemerintah Kota Pariaman TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp648.100.984.541,33 dan Rp619.164.014.291,00. Realisasi Belanja TA 2024 meningkat sebesar Rp28.936.970.250,00 atau 4,67% dari Belanja TA 2023. Rincian Belanja adalah:



4.2 Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

| No. | Jenis Belanja Daerah | Anggaran Tahun 2024 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) | % | Realisasi Tahun 2023 (Rp) |
|---------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Belanja Operasi | 520.018.545.721,88 | 501.221.378.133,33 | 96,39 | 467.268.136.266,00 |
| 2 | Belanja Modal | 64.737.258.930,00 | 58.767.684.209,00 | 90,78 | 63.803.160.485,00 |
| 3 | Belanja Tidak Terduga | 500.000.000,00 | 120.495.000,00 | 24,10 | 0,00 |
| 4 | Belanja Transfer | 90.601.344.884,12 | 87.991.427.199,00 | 97,12 | 88.092.717.540,00 |
| Jumlah | | 675.857.149.536,00 | 648.100.984.541,33 | 95,89 | 619.164.014.291,00 |

Pengeluaran pembiayaan TA 2024 dianggarkan Rp1.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal kepada PT Bank Nagari dengan SP2D Nomor 13.77/04.0/000001/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/11/2024 tanggal 06 November 2024 tentang Penyaluran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada PT. Bank Nagari Cabang Pariaman Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 dan Persetujuan Walikota Pariaman tanggal 26 Oktober 2024.

Dalam hal ini, Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.3 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran TA 2024

| No | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran |
|---------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Pendapatan | 644.362.029.673,36 | |
| 2. | Belanja | | 648.100.984.541,33 |
| 3. | Penerimaan Pembiayaan | 7.383.487.579,51 | |
| 4. | Pengeluaran Pembiayaan | | 1.000.000.000,00 |
| Jumlah | | 651.745.517.252,87 | 649.100.984.541,33 |

Berdasarkan tabel diatas, disimpulkan bahwa pada Akhir Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kota Pariaman memiliki jumlah SiLPA akhir TA 2024 (per 31 Desember 2024) sebesar Rp2.644.532.711,54 mengalami penurunan sebesar (Rp4.738.954.867,97) atau 64,18% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp7.383.487.579,51.



BAB V

INOVASI DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 386 ayat (2) menyatakan bahwa Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 388 ayat (7), (9), (10) dan (11) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah melaporkan Inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri dan Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pasal 4 menyatakan bahwa Inovasi daerah berbentuk :

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 6 menyatakan bahwa Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.



Tabel 5.1 Inovasi Daerah Tahun 2024

| No. | Judul Inovasi | Bentuk Inovasi | OPD |
|-----|--|---|---|
| 1 | ESDM Versi 3 (Elektronik Sumber Daya Manusia Versi 3) | Inovasi pelayanan publik | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM Kota Pariaman) |
| 2 | SIBAT Kota Pariaman (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat Kota Pariaman) | Inovasi pelayanan publik | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Kota Pariaman) |
| 3 | BALADA (Barcode Label Aset Daerah) Kota Pariaman | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD Kota Pariaman) |
| 4 | Kipang "O" (Klinik Pengadaan Barang/Jasa Online) | Inovasi pelayanan publik | Bagian Administrasi Pembangunan (Bagian Administrasi Pembangunan- Sekretariat Daerah) |
| 5 | PARIAMAN UNGGUL PRODUKTIF TERINTEGRASI | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | BAPPEDA Kota Pariaman |
| 6 | MUSRENBANG TERINTEGRASI | Inovasi pelayanan publik | BAPPEDA Kota Pariaman |
| 7 | RANCAK (Rekap Analisis Catatan Kependudukan) | Inovasi pelayanan publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil Kota Pariaman) |
| 8 | Rumah Data Desa Statistik | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo Kota Pariaman) |
| 9 | Podcast IKP (Informasi Kominfo Pariaman) | Inovasi pelayanan publik | Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo Kota Pariaman) |
| 10 | SIPEKAD (Sistem Informasi Absensi Perangkat Desa) | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo Kota Pariaman) |
| 11 | Tourism Promotion Warrior | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud Kota Pariaman) |
| 12 | Visit Destinasi Plus | Inovasi pelayanan publik | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud Kota Pariaman) |
| 13 | Silada PH Dipa (Sistem Pelayanan Data Pengunjung Hotel Dinas Pariwisata) | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud Kota Pariaman) |



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2024

| | | | |
|----|---|---|---|
| 14 | GERAKAN SATU JAM MENYAPU DESTINASI WISATA (GSM DEWI) | Inovasi pelayanan publik | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud Kota Pariaman) |
| 15 | NASI SALA (layaNAn konsultaSI permaSALahan tAnah) | Inovasi pelayanan publik | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP Kota Pariaman) |
| 16 | Sistem Informasi dan Layanan Bangunan Air dan DrAinase (SALA BADA) | Inovasi pelayanan publik | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP Kota Pariaman) |
| 17 | ALAT PUPUK JAGUNG PRAKTIS | Inovasi pelayanan publik | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD Kota Pariaman) |
| 18 | Alat Pengusir Burung Otomatis | Inovasi pelayanan publik | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD Kota Pariaman) |
| 19 | PUspaga TeRIntegrasi melalui Edukasi terhadap ragam Masalah Anak Sekolah (Putri Emas) | Inovasi pelayanan publik | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB Kota Pariaman) |
| 20 | KOPI (Kartu Informasi Potensi Investasi) | Inovasi pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker Kota Pariaman) |
| 21 | LAPAU BOSS TEMATIK (Layanan Perizinan Berusaha Bisa OSS Tematik) | Inovasi pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker Kota Pariaman) |
| 22 | KLIK HI MOBILE (Klinik Konsultasi Hubungan Industrial Mobile) | Inovasi pelayanan publik | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker Kota Pariaman) |
| 23 | SEKOLAH DIBALIK JERUJI EMAS (EDUKASI MASYARAKAT) | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora Kota Pariaman) |
| 24 | BUMS (BEASISWA UNGGULAN MINANG SMART) | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora Kota Pariaman) |
| 25 | Lalu Lintas Pantau Langsung Dari Handphone (LALAPAN LAHAP) | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Perhubungan (Dishub Kota Pariaman) |



| | | | |
|----|--|---|--|
| 26 | SISTEM LAYANAN PENGADUAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Perhubungan (Dishub Kota Pariaman) |
| 27 | KORSI BERAD 0% (Koperasi Berantas Rentenir dan Lintah Darat Dengan Bunga 0%) | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM (Disperindagkop ukm Kota Pariaman) |
| 28 | LAPAK OPD (Layanan Pengelolaan Kearsipan OPD) | Inovasi pelayanan publik | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip Kota Pariaman) |
| 29 | Klinik Sultan (Klinik Konsultasi Keuangan) | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman (DP3 Kota Pariaman) |
| 30 | SLADA (Slip Gaji Digital) | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman (DP3 Kota Pariaman) |
| 31 | SILASIH (SISTEM INFORMASI PELANGGAN AIR BERSIH) | Inovasi pelayanan publik | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkimlh Kota Pariaman) |
| 32 | Bank Darah Pol PP Damkar | Inovasi pelayanan publik | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan PemadamKebakaran (Dinas Satpol pp damkar Kota Pariaman) |
| 33 | SAUS VEDAS (Standar Usulan Verifikasi dan Validasi Data Sosial) | Inovasi pelayanan publik | Dinas Sosial Kota Pariaman (Dinsos Kota Pariaman) |
| 34 | BIMOSIGAKIN PLUS (Bimbingan Motivasi Berprestasi Bagi Siswa Miskin Plus) | Inovasi pelayanan publik | Dinas Sosial Kota Pariaman (Dinsos Kota Pariaman) |
| 35 | KUPAS DURIAN VERSI II (KONSULTASI, PENGAWASAN, PENGADUAN DAN SARAN VERSI II) | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Inspektorat Kota Pariaman |
| 36 | "DIGIMONS" (DIGITALISASI MONITORING DAN EVALUASI SAKIP) | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Inspektorat Kota Pariaman |



| | | | |
|----|--|---|---|
| 37 | E-BOOK PEDOMAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN (E-BOOK PAK RT) | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Inspektorat Kota Pariaman |
| 38 | KADER SABANA PKK (KADER SADAR BELA NEGARA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA) | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Kantor Kesbangpol Kota Pariaman |
| 39 | ManDaKeK (Manfaat Dasawisma untuk Kesejahteraan Keluarga) | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | Kecamatan Pariaman Selatan |
| 40 | Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (SPPKD) | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Kecamatan Pariaman Timur |
| 41 | LaDO (Laporan Online Dubalang) | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | Kecamatan Pariaman Utara |
| 42 | INFO PARLEMEN | Inovasi pelayanan publik | Sekretariat DPRD Kota Pariaman |
| 43 | YANTI BERSATU (Layanan Terpadu Tuberkulosis Satu Pintu) | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | UPT Puskesmas Air Santok - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman) |
| 44 | SILIK MANTIK (Si Cilik Pemantau Jentik) | Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah | UPT Puskesmas Air Santok - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman) |
| 45 | KELUARGA KOE (KELOLA OBAT KADALUWARSA DI RUMAH TANGGA DENGAN KOTAK OBAT EXPIRED) | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Kampung Baru Padusunan - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman) |
| 46 | GEMESIN (GIRING DAN EDUKASI MAMA MUDA AGAR SADAR AKAN PENTINGNYA IMUNISASI PADA ANAK) | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Kampung Baru Padusunan - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman) |
| 47 | JEDAH TASBIH (JEMPUT DAHAK TB HC KURAI TAJI) | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Kurai Taji - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman) |



| | | | |
|----|--|--------------------------|---|
| 48 | BUSER PUJI (BULETIN SURVEILANS PUSKESMAS KURAI TAJI) | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Kurai Taji - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman) |
| 49 | SAKINAH FORTE (STOP KEMATIAN IBU HAMIL DAN ANAK HINDARI 4 TERLALU 3 TERLAMBAT) | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Kurai Taji - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman) |
| 50 | KUE CINTA MAS AJI (KONSULTASI EDUKASI CALON PENGANTIN TERINTEGRASI PUSKESMAS KURAI TAJI) | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Kurai Taji - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman) |
| 51 | DEBATIK (DESA BEBAS JENTIK) | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Kurai Taji - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman) |
| 52 | SIBEROT (Sikat gigi BERSama Orang Tua) | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Marunggi - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman) |
| 53 | SELYANG (Sentral Layanan pengaduan dan Aspirasi masyarakat puskesmas marunggi) | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Marunggi - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman) |
| 54 | JUMANJI (Juru peMANTau kesehatan Jiwa) | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Marunggi - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman) |
| 55 | Stiker Cinta | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Marunggi - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman) |
| 56 | GANG GENIT (pereGANGAn tiga mENIT) | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Marunggi - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman) |
| 57 | PALAI CUMI MANTAB (PEMERIKSAAN KEHAMILAN DIDAMPINGI SUAMI DAN PEMANTAUAN MINUM TABLET TAMBAH DARAH) | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Naras - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman) |
| 58 | SIKAD (SISTEM KEGAWATDARURATAN DINI) | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Pariaman -Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman) |
| 59 | SILANSA (SISTEM INFORMASI LANSIA SEHAT) | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Sikapak - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman) |
| 60 | si BIKI MASAK BAKA (SISTEM INFORMASI BULETIN KESEHATAN PUSKESMAS SIKAPAK BAGI | Inovasi pelayanan publik | UPT Puskesmas Sikapak - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman) |



| | MASYARAKAT LUAS) | | |
|----|--|--------------------------|---|
| 61 | DEMI BESTI (DiabEtes Melltus, mari BErSama kita aTasl) | Inovasi pelayanan publik | UPT RS.Sadikin - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman) |
| 62 | IBU MUDA (Inovasi BUku taMU DigitAl) | Inovasi pelayanan publik | UPT RS.Sadikin - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman) |
| 63 | OPIUM (Optimalisasi Pelayanan Informasi obat melalUi Media whatsapp Messenger) | Inovasi pelayanan publik | UPT RS.Sadikin - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman) |
| 64 | PEDANG RS (Pengumpulan DAta INM (Indikator Nasional Mutu) diGital Rumah Sakit) | Inovasi pelayanan publik | UPT RS.Sadikin - Dinas Kesehatan Kota Pariaman (Dinkes Kota Pariaman) |



BAB VI PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) berisikan antara lain : capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil EPPD, Opini atas Laporan Keuangan Daerah tahun sebelumnya, realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah serta Inovasi Daerah.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan berbagai urusan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang merupakan tujuan penerapan Otonomi Daerah. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja makro dimana perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pariaman mengalami sedikit peningkatan sebesar 80,49 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 79,76. Angka kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 4,26 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,20 persen. Angka pengangguran mengalami penurunan dari 5,68 persen menjadi 5,32 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman mengalami percepatan dengan tumbuh sebesar 4,51 persen. Sementara Pendapatan per kapita Kota Pariaman meningkat mencapai 69,17 juta rupiah/jiwa. Akan tetapi, ketimpangan pendapatan Kota Pariaman tergolong ketimpangan rendah dengan nilai tercatat 0,281.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan, merupakan upaya dari pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang berlandaskan kepada visi Kota Pariaman yaitu "*Pariaman Kota Tujuan Wisata Budaya yang Islami*" yang dijabarkan ke dalam misi Pembangunan Daerah. Kebijakan Pemerintah Kota Pariaman diperlukan sebagai jembatan yang menghubungkan antara Visi dan Misi dengan strategi yang ditetapkan. Strategi Pemerintahan Kota Pariaman merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan maupun sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Program tersebut merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.



Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kota Pariaman mendapatkan skor **3,2982** dengan status “Sedang”. Sedangkan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman terhadap Laporan Keuangan Kota Pariaman Tahun 2023 dengan penyajian “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

Dalam menentukan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan di Kota Pariaman, perlu ditinjau sumber-sumber penerimaan daerah yang menjadi kriteria penting dalam mengalokasikan belanja, menentukan strategi dan prioritas anggaran. Pada Tahun 2024 target dari pendapatan Pemerintah Kota Pariaman sebesar Rp669.473.661.957,00 dengan realisasi sebesar Rp644.362.029.673,36 atau sebesar 96,25%. Untuk belanja daerah pada APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 675.857.149.536,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 648.100.984.541,33 atau sebesar 95,89%. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Pariaman memiliki 64 inovasi daerah pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kemendagri.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 ini dibuat dan diharapkan informasi ini dapat menjadi masukan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.